

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

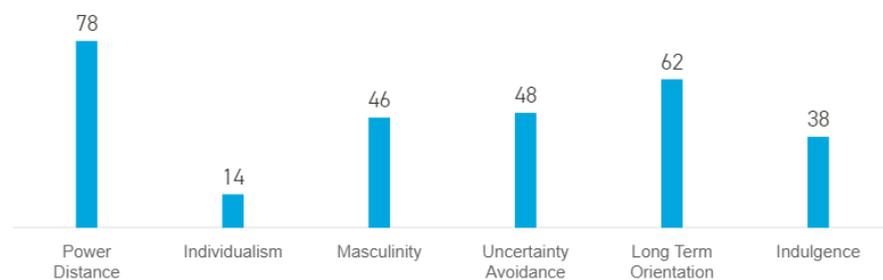
Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Littlejohn (2011) setiap keluarga memiliki aspek masing-masing yang meliputi saling ketergantungan, hierarki, perubahan lingkungan, aturan yang ada, tujuan, dan keseimbangan. Keluarga juga dapat diartikan sebagai sekumpulan dua orang atau lebih yang tinggal dalam satu atap yang sama dalam jangka waktu yang lama. Anggotanya memiliki keterikatan satu sama lain dan mereka saling mempertahankan budayanya.

Seringkali keluarga disebut sebagai tempat untuk kembali, tempat untuk berkumpul, tempat paling nyaman, untuk dijadikan tempat bercerita keluh kesah, hingga untuk menyelesaikan sebuah masalah. Manusia selama hidupnya mengalami perkembangan baik itu secara fisik maupun mental. Perkembangan manusia diawali dari bayi, anak-anak, dewasa, dan pada akhirnya akan menjadi tua atau lanjut usia (lansia). Menurut undang-undang no 13 tahun 1998, tentang kesejahteraan lanjut usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dari lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut Reimer, Stanley, dan Beare dalam Azizah (2011, p. 12) lansia didefinisikan berdasarkan karakteristik sosial masyarakat yang menganggap bahwa orang telah menjadi tua ketika menunjukkan ciri fisik seperti rambut beruban, kerutan kulit, dan hilangnya gigi.

Dalam usia yang sudah tidak produktif lagi, lansia ini seharusnya berada di bawah pengawasan keluarga dan dirawat oleh anggota keluarganya yang lebih muda. Melihat fungsi keluarga yang seharusnya memiliki fungsi perlindungan, lansia sangat perlu untuk dirawat oleh pihak keluarganya. Keluarga diharapkan memberikan tempat yang nyaman serta lingkungan yang aman untuk keberlangsungan hidup lansia.

Menurut Semium (2010, p. 62) terdapat beberapa masalah utama dan penyebab gangguan kepribadian pada saat menginjak usia lanjut adalah keterbatasan fisik yang dapat menyebabkan terhambatnya untuk melakukan kegiatan, perasaan yang semakin berkurang, dan adanya perasaan dirinya terisolasi dari masyarakat. Permasalahan yang terutama adalah mengenai penurunan kemampuan fisik sehingga kekuatan fisiknya berkurang yang dapat menyebabkan munculnya penyakit yang bisa menyebabkan turunnya produktivitas orang lanjut usia. Dengan adanya masalah tersebut, sering kali mereka merasa dirinya tidak berharga dan kurang dihargai.

GAMBAR 1 GRAFIK DIMENSI BUDAYA DARI HOFSTEDE
SUMBER: WWW.HOFSTEDE-INSIGHTS.COM, 2021



Untuk sebagian budaya, menjadi tua merupakan suatu hal yang negatif, tetapi untuk sebagian lainnya menjadi tua adalah suatu hal yang positif. Menurut dimensi budaya yang dikemukakan oleh Hofstede (2020), Indonesia termasuk ke dalam negara yang memandang orang yang sudah lanjut usia atau menjadi tua merupakan suatu hal membahagiakan. Orang yang sudah tua akan melihat anak-anaknya yang sudah berkeluarga dan akan merasa senang karena tugasnya sebagai orang tua yang telah usai.

Berdasarkan dimensi budaya yang dikeluarkan oleh badan Hofstede, Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki orientasi jangka panjang. Dimensi ini menjelaskan bagaimana masyarakatnya memandang masa lalu dan bersiap untuk menghadapi masa depan. Indonesia mendapatkan skor tinggi 62 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki budaya pragmatis. Masyarakat Indonesia percaya bahwa kebenaran sangat

tergantung pada situasi, konteks, dan waktu. Dalam pandangan budaya berorientasi jangka panjang, masyarakat Indonesia memandang orang yang sudah lanjut usia atau menjadi tua merupakan suatu hal membahagiakan. Orang yang sudah tua akan melihat anak-anaknya yang sudah berkeluarga dan akan merasa senang karena tugasnya sebagai orang tua yang telah usai.

Selain itu, di dalam budaya Indonesia sendiri, sudah menjadi suatu kewajiban seorang anak untuk mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia. Hal ini dibuktikan dengan adanya hari Lanjut Usia Nasional yang dibuat oleh Kementrian Sosial Indonesia. Hari Lanjut Usia Nasional ini diperingkatkan setiap tanggal 29 Mei. Dalam hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah menghimbau seluruh masyarakat untuk menghormati dan meningkatkan kualitas kesejahteraan lansia. Berbagai kegiatan yang biasa dilakukan untuk menyejahterakan para lansia, seperti acara senam bersama, penyerahan berbagai paket bantuan, atau acara bakti sosial di panti jompo.

Nyatanya, jumlah lansia di Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak bahkan di tahun 2050 diprediksi jumlah lansia dapat mencapai angka 69 juta orang. Hal ini didukung oleh fakta yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, dimana menjelaskan dari jumlah penduduk di Indonesia, 27 juta penduduk yang ada, ialah orang-orang lanjut usia. Jawa Barat menempati posisi ke 7 terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk lanjut usianya. Banyaknya jumlah lansia di Jawa Barat menunjukkan bahwa angka harapan hidup masyarakat Jawa Barat yang tinggi. Hal ini juga didukung oleh pandangan masyarakat yang melihat bahwa menjadi tua adalah suatu hal yang bernilai positif.

Namun, ketika menginjak usia lanjut, akan muncul beberapa stereotip yang diberikan oleh masyarakat kepada orang lanjut usia (Triningtyas & Asriwanti, 2018, p. 2). Stereotip yang diberikan kepada para lansia yaitu masyarakat seringkali mengecap usia lanjut bagaikan tahap hidup yang tidak menyenangkan. Hal tersebut dikarenakan pada saat usia lanjut akan sulit untuk tetap produktif karena terhalang oleh Kesehatan fisik

dan mental. Kemudian, para lansia ini sering diberi label sebagai orang yang tidak menyenangkan untuk berada di sekitarnya. Hal ini muncul karena masyarakat menanggapi lansia sebagai beban karena harus diperlakukan secara khusus. Walaupun terdapat fakta jumlah lansia akan terus meningkat, tetapi kehadiran mereka akan justru berada dalam kelompok yang termarginalkan, yaitu suatu kondisi yang dalam beberapa situasi dapat mengucilkan mereka untuk dapat berinteraksi dengan orang di sekitarnya.

Namun, seiring dengan waktu dan kuatnya dampak modernisasi, ternyata nilai-nilai mengenai lansia seperti yang diungkapkan oleh badan Hofstede semakin bergeser. Salah satu dampak negatif dari modernisasi adalah tumbuhnya sikap *individualistic*. Menurut Hofstede (2020), ciri-ciri masyarakat yang individualistik adalah mereka yang tidak berketergantungan dengan orang lain, serta mendefinisikan citra diri sebagai “Aku” bukan “kita”. Hal ini menyebabkan pergeseran pandangan bahwa orang lanjut usia bisa menjadi beban bagi keluarga, saudara, dan teman.

Banyak terjadi anak yang tidak mau mengurus orang tuanya karena masalah berkomunikasi. Anak tidak mau memahami komunikasi orang tuanya yang sudah lanjut usia yang semakin lama semakin menurun. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan menitipkan orang tuanya di panti jompo, maka kehidupannya akan lebih baik daripada saat tinggal bersama anaknya. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-harinya, antara anak dan orang tua yang sudah lansia sering terjadi adu mulut dan pendapat sehingga anaknya berpikir bahwa apabila orang tuanya tinggal dengan yang sama-sama lansia, maka hidupnya akan lebih bahagia.

Seharusnya dalam komunikasi keluarga berfokus pada komunikasi orang tua dan anak yang bersangkutan untuk membangun realitas social secara bersama. Hubungan yang baik antara anak dan orang tua akan menyebabkan komunikasi di dalam keluarganya juga baik. Begitupun

sebaliknya, ketika hubungan anak dan orang tua tidak baik, maka komunikasinya pun tidak akan berjalan baik.

Hal ini diperberat ketika lansia tersebut termasuk ke dalam kelompok *Lesbian Gay Bisexual* dan *Transgender* (LGBT). Komunitas ini sudah tidak asing di telinga masyarakat sejak tahun 1990-an. Dalam penelitian ini, subjek yang hendak diteliti berasal dari kelompok LGBT, yaitu *transgender* atau transpuan. Sama seperti manusia biasa, transpuan juga akan mengalami masa tua sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa mereka juga akan disebut sebagai lansia.

Menurut Nurhidayati (2011, p. 3), transpuan dalam konteks psikologis merupakan gejala transpuanisme, yakni seseorang secara jasmani berjenis kelainannya jelas dan sempurna. Namun, secara psikis cenderung untuk menampilkan diri sebagai lawan jenis. Dengan kata lain, pada transpuan, jika laki-laki ingin menjadi perempuan dan sebaliknya jika perempuan ingin menjadi laki-laki. Terdapat faktor biologis dan sosial yang bercampur dalam memengaruhi karakter seorang transpuan. Keberadaan transpuan yang ditolak secara sosial lebih disebabkan oleh sebuah masalah yang dianggap tidak normal dari sebuah tata nilai kebudayaan dari kelompok mayoritas masyarakat. Mereka menanggapi kelompok transpuan sebagai kelompok yang perlu dihindari karena memiliki perilaku yang menyimpang dari tatanan kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam Jurnal *Equilibrium FKIP Unimuh Makassar*, Volume II No. 1 Januari 2016 (Jaruddin & Nurdelia, 2016), menyatakan 46% sangat setuju bahwa kaum transpuan bertentangan dengan norma sosial, 35% setuju dan 15 % yang tidak setuju serta 4% sangat tidak setuju. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat menganggap perilaku transpuan itu sebagai perilaku menyimpang.

Banyaknya kasus nyata yang menimpa kaum transpuan ini kerap kali menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Misalnya, di Bekasi ditemukan kasus adanya dua orang transpuan yang dipersekusi dengan cara

ditelanjangi oleh puluhan orang karena masyarakat tersebut melihat transpuan sebagai orang yang terpinggirkan dan pantas untuk menerima hal tersebut. Kedua transpuan tersebut dikejar, dipukuli, digunduli, dan salah satu transpuan tersebut ditelanjangi di depan umum. Kemudian kasus yang sempat memanas, dimana seorang Youtuber bernama Ferdinand Paleka yang melakukan prank kepada kaum transpuan di Bandung. Dirinya memberikan sembako kepada kaum transpuan, tetapi isinya ternyata berupa sampah. Berita ini diunggah oleh Liputan 6 dengan judul “Ferdian Paleka Beri Sampah Kepada Waria dan Anak Jalanan, Baim Wong: Ini Diskriminasi Serta Pelecehan” pada 6 Mei 2020.

Banyaknya jumlah kasus yang menimpa kaum transpuan membuat mereka semakin termarginalkan. Menurut Ketua Lembaga Sosial Masyarakat Arus Pelangi, Yuli Rustinawati, sebanyak 89,3 persen LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan (Tempo.co, 2016). Kasus diskriminasi ini juga tentunya dialami oleh para transpuan yang sudah lansia. Menurut Yulianus Rettoblaut, pendiri Rumah Singgah Waria “Anak Raja” yang diwawancarai oleh Dw.com (Welle, 2013) mengatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kurang memperhatikan kaum transpuan yang sudah lansia sehingga dirinyalah yang harus memulai langkah tersebut. Kebanyakan dari LSM yang ada hanya berfokus pada kelompok LGBT yang masih berusia muda.

Khususnya pada saat pandemi seperti ini, para transpuan lansia kesulitan untuk mendapatkan uang karena mereka mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Biasanya, mayoritas transpuan bekerja di sektor non formal sehingga ketika pandemi ini terjadi, mereka kesulitan untuk mendapat pekerjaan karena mereka dianggap sebagai penyakit dan tidak boleh bekerja dengan masyarakat biasa.

Kasus diskriminasi lainnya yang diterima oleh lansia transpuan adalah kasus Mira. Mira adalah seorang transpuan lansia yang kehilangan nyawanya setelah dibakar sekelompok laki-laki karena dituduh mencuri *handphone* dan dompet warga. Hal ini bermula ketika seorang supir truk

yang memarkirkan truknya di lingkungan tempat Mira tinggal dan mengaku kehilangan dompet dan *handphone* setelah bertemu Mira. Namun, supir truk dan rekannya tersebut tidak dapat menemukan barang bukti apapun. Tetapi, para supir truk tersebut tetap mengintrogasi Mira dan mengancam dirinya akan dibakar apabila tidak mengakui. Akhirnya, Mira dibakar oleh kelompok supir truk tersebut, Mira sempat meminta bantuan kepada warga setempat, tetapi naas, Mira meninggal dunia di rumah sakit karena luka bakar yang dialaminya.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, terdapat beberapa hal yang tidak seharusnya dialami para transpuan. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh magdelene.co mengenai “Negara Menutup Mata Terhadap Kekerasan atas Transpuan” menjelaskan sepanjang 2017, terdapat 50 transpuan di empat kota di Indonesia yang menjadi sasaran kekerasan, mulai dari penggerebekan, penganiayaan, intimidasi, upaya korektif, hingga tindakan-tindakan yang mendegradasi hak-hak dasar manusia. Berdasarkan kasus tersebut, banyak transpuan yang lebih memilih untuk mengasingkan diri dan menilai dirinya sebagai beban dari masyarakat sehingga menimbulkan penilaian diri sendiri sebagai hal yang negatif.

Berdasarkan kasus yang dialami para lansia, maka salah satu jalan keluar agar para lansia tidak ditelantarkan oleh keluarganya adalah dengan menitipkan mereka di panti jompo di mana dari catatan data statistik BPS yang dilansir di artikel yang berjudul “*Hasil Survey YPI, Jababeka Senior Living Merupakan Panti Werdha Terbaik di Indonesia*” (Yayasan Peduli Indonesia, 2019), Indonesia memiliki lebih dari 20 panti werdha dan 250 panti jompo yang tersebar di Indonesia. Fungsi dari panti jompo atau werdha ini adalah sebagai sarana yang berbentuk rumba untuk menampung para lansia dengan fasilitas layanan 24 jam, serangkaian aktivitas, serta hiburan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan para lansia.

Terdapat salah satu panti jompo di daerah Depok, Jawa Barat yang cukup menarik untuk diteliti. Panti Jompo tersebut bernama Rumah Singgah Waria “Anak Raja”. Keunikan dari Rumah Singgah Waria “Anak Raja”,

dengan jumlah penghuni sebanyak 831 orang yang Sebagian besarnya adalah lansia, ternyata seluruh penghuninya adalah dari kelompok transpuan. Hal yang menarik lainnya adalah Rumah Singgah Waria “Anaka Raja” ini dinyatakan sebagai panti jompo pertama di dunia untuk kaum transpuan. Hal ini diterbitkan oleh Suara.com, dalam berita yang berjudul “Menengok Rumah Singgah Waria Jompo Satu-satunya di Dunia” pada tahun 2016.

Sebagai kelompok masyarakat yang termarginalkan, keberadaan Rumah Singgah “Waria Anak Raja” ini merupakan sebuah usahakeras yang dilakukan oleh pendiri rumah singgah tersebut. Apalagi, jika dilihat dari lokasinya, yaitu kota Depok, hal ini membuat tantangan semakin besar. Berdasarkan laporan Indeks Kota Toleran tahun 2018 yang dibuat oleh Setara, kota Depok berada pada peringkat 89 dari 94 dengan skor 3.490. Dengan skor tersebut, kota Depok masuk ke dalam 10 peringkat terendah kota intoleran di Indonesia.

**TABEL 1 10 KOTA DENGAN SKOR TOLERANSI RENDAH
SUMBER: RINGKASAN EKSEKUTIF IKT, 2018**

Peringkat	Kota	Skor
85	Sabang	3.757
86	Medan	3.710
87	Makassar	3.637
88	Bogor	3.533
89	Depok	3.490
90	Padang	3.450
91	Cilegon	3.420
92	Jakarta	2.880
93	Banda Aceh	2.830
94	Tanjung Balai	2.817

1.2 Rumusan Masalah

Berada di lingkungan yang tinggi dengan tingkat intoleran, membuat transpuan lansia harus berusaha diterima di lingkungan sekitarnya. Apalagi, mereka termasuk ke dalam kelompok yang sangat

dipandang rendah. Hal ini menyebabkan mereka semakin sulit untuk mendapatkan tempat di masyarakat.

Di kota Depok, tingginya tingkat intoleran disebabkan oleh beberapa aspek yang memicu terjadinya konflik sosial. Aspek tersebut antara lain identitas agama, identitas ras/suku, aspek identitas kewilayahan, sumberdaya ekonomi, aspek relasi sosial, dan aspek relasi politik. Padahal, Depok sendiri dikatakan sebagai kota Religius. Tetapi berdasarkan hasil survey *Center for Election and Political Party* yang dilakukan oleh FISIP UI, menyatakan bahwa aspek orientasi politik, aspek identitas wilayah, dan identitas agama menjadi aspek yang paling menonjol dalam menyebabkan konflik yang membuat turunnya tingkat toleran di kota Depok.

Selain itu, terdapat beberapa kasus yang disebabkan oleh identitas agama yang terjadi di kota Depok. Misalnya, diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam beribadah. Beberapa badan yang pernah meneliti tentang tingkat intoleran di kota Depok juga menyampaikan bahwa masyarakat kota Depok masih diliputi oleh kecurigaan. Pada tahun 2009, pemerintah kota Depok pernah mencabut izin bangunan gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul dengan alasan yang tidak jelas.

Untuk itu, komunikasi merupakan factor yang sangat penting dalam merajut kehidupan berbangsa yang dilandaskan dengan toleransi. Selain itu peran pemerintah juga sangatlah penting untuk mengkomunikasikan toleransi antar masyarakat yang tidak dibatasi dengan aspek apapun. Dengan adanya transpuan yang tinggal di wilayah Depok, hal tersebut menjadi ancaman besar bagi para transpuan karena masyarakat sekitar yang sulit menerima keberadaan mereka.

Sehingga, dalam proses berdirinya Rumah Singgah Waria “Anak Raja” tersebut, terdapat beberapa strategi persuasi yang perlu dilakukan oleh pendiri rumah singgah tersebut. Persuasi tersebut harus dilakukan kepada warga sekitar dan pemerintah karena rumah singgah tersebut berada di lingkungan masyarakat. Maka daripada itu, alasan yang mendasari topik penelitian ini adalah bagaimana strategi persuasi yang dilakukan oleh

pendiri rumah singgah dalam mendirikan Rumah Singgah Waria “Anak Raja” yang berada di kota Depok.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kaum transpuan lanjut usia yang berada di lingkungan masyarakat dan kehadiran panti jompo khusus untuk transpuan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses persuasi dari pendiri Rumah Singgah Waria “Anak Raja” Depok saat mendirikan rumah singgah tersebut?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah saat berdirinya Rumah Singgah Waria “Anak Raja” ini?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses persuasi dari pendiri Rumah Singgah Waria “Anak Raja” Depok saat mendirikan rumah singgah tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah saat berdirinya Rumah Singgah Waria “Anak Raja” ini.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidik baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah

Kegunaan Akademis:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi perkembangan kajian komunikasi interpersonal dalam konteks strategi persuasi demi tercapainya sebuah kesepakatan.
2. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang cara meneliti strategi persuasi dalam mencapai kesepakatan.

Kegunaan Praktis:

1. Penelitian ini dilakukan guna memberikan contoh bagi transpuan khususnya yang sudah lanjut usia untuk melihat bentuk dirinya sebagai nilai yang positif agar bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sebagaimana mestinya. Serta, penelitian ini juga dilakukan guna memberikan wawasan kepada masyarakat tentang bagaimana proses persuasi yang dilakukan oleh kaum transpuan untuk dapat diterima di lingkungan masyarakat, khususnya mereka yang sudah lanjut usia.